



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2019-2024**

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Pengantar	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Maluku	34
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
4.1.1. Tujuan	39
4.1.2. Sasaran	39
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
5.1 Strategi	40
5.2 Arah Kebijakan	40
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	41
6.1 Program Kegiatan	41
6.2 Kelompok Sasaran	44
6.3 Pendanaan Indikatif	44
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII. PENUTUP	54

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridhoNya telah dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis BKD Provinsi Maluku ini, hakikatnya merupakan pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sebagai implementasi dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, maka melalui dokumen Rencana Strategis ini BKD Provinsi Maluku mempunyai acuan umum tentang arah pelayanan kepegawaian ke depan.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, BKD Provinsi Maluku telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis BKD Provinsi Maluku disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan di bidang kepegawaian.

Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun ini akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan pada BKD Provinsi Maluku guna mewujudkan pelayanan di bidang kepegawaian yang semakin baik ke depan. Akhirnya, Renstra BKD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam :

1. Penyusunan rencana strategis kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Penyusunan penetapan kinerja (*Performance agreement*);
4. Pelaksanaan tugas-tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan BKD Provinsi Maluku; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKD Provinsi Maluku.

Akhir kata Semoga ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hidayah dan rahmatNYA bagi kita semua dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai tanggung jawab terhadap Negara, Bangsa dan Masyarakat khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Ambon, 2019

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku,



Drs. JASMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741226 199412 1 003

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagai unsur penunjang Gubernur Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kepegawaian, serta adanya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian guna menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara (ASN) unggul untuk itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku berkomitmen dalam melaksanakan perubahan paradigma tersebut harus selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dengan tujuan mewujudkan pengelolaan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang lebih profesional dan inovatif. Tentunya untuk lebih profesional dan inovatif ini antara lain diwujudkan dalam penerapan teknologi informasi terhadap pelayanan kepegawaian yang merupakan prinsip dasar dari transparansi dengan penggunaan aplikasi melalui Simpeg online maka dituntut adanya penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai.

Disamping itu kebijakan kepegawaian dilaksanakan melalui sistem merit yang mengharuskan pengelolaan kepegawaian untuk menciptakan suatu pola pengembangan karier yang jelas dan transparan bagi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian dituntut untuk memberikan pelayanan kepegawaian secara optimal sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya aparatur.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, ditegaskan bahwa Pegawai ASN (PNS dan PPPK), berfungsi sebagai (a) pelaksana kebijakan publik; (b) pelayan publik; dan (c) perekat dan pemersatu bangsa (Pasal 10). Sedangkan tugasnya sebagaimana dikonstruksi dalam Pasal 11, adalah (a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan (c) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara tentang perannya seperti disebutkan di dalam Pasal 12 adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan uraian, tugas, fungsi dan peran ASN sebagaimana dijelaskan di atas, tampak bahwa implementasi ketiga aspek tersebut memerlukan suasana organisasi birokrasi yang kondusif dan dinamis, yang dikelola berdasarkan manajemen ASN secara tepat-guna dan berdaya-guna, atau dengan kata lain manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit (Pasal 51). Sehingga melalui pendekatan manajerial yang sedemikian, maka diharapkan ASN akan mampu berprestasi dalam bidang tanggung jawabnya masing-masing agar berdampak positif terhadap *performance* organisasi birokrasi.

Mengacu pada gambaran di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membentuk profil, membina dan mengembangkan kualitas ASN di Maluku, harus merumuskan gagasan-gagasan kreatif dan strategis yang diharapkan adaptif dan fungsional terhadap kepentingan dan kebutuhan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Maluku. Dalam kerangka inilah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku disusun, dengan harapan agar proses rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan kapasitas termasuk promosi jabatan bagi ASN di Provinsi Maluku dapat dilaksanakan secara baik dan terukur sesuai prinsip-prinsip merit sistem sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku adalah:

01. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku *jo.* UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat *jo.* UU Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku *jo.* UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku.
02. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
03. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
04. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
05. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
06. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
07. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
08. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
09. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pensiun.
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
26. Peratutan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.
29. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk :

- (1) Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- (2) Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku dalam rangka upaya meningkatkan profesionalitas ASN yang menjamin adanya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik yang berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Renstra BKD Provinsi Maluku ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang tentang gambaran umum potensi dan permasalahan lingkup kepegawaian yang menjadi alasan perlunya rencana strategis. Selain itu, dimuat pula tentang maksud, tujuan, dan landasan hukum penyusunan serta sistematika penulisan Renstra.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas dan fungsi dari bidang-bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yaitu Standar Pelayanan Minimal dan hasil kinerja bidang. Selain itu, Bab ini juga memuat kondisi saat ini dengan menampilkan capaian kinerja, kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dan proyeksi ke depan.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Aparatur
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini mengungkapkan identifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Isu-isu strategis lingkup kepegawaian secara umum maupun isu-isu kepegawaian berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, kepangkatan, mutasi, pembinaan, kesejahteraan dan

pemberhentian pegawai yang dituangkan dalam pola kendala, peluang dan program prioritas.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Provinsi Maluku
- 3.4. Telaahan Rencana K/L
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dimuat rumusan untuk mengoperasionalkan Visi yang lebih spesifik. Dimuat dari tujuan dan sasaran yang diambil dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud.

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dimuat rumusan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode lima tahun dan tahunan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan terukur.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain berisi penegasan bahwa Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja serta referensi dan penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Selain itu, dimuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta ekspektasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas dan Fungsi

2.1.1.1 Kepala BKD Provinsi Maluku

Kepala BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian.

2.1.1.2 Sekretariat

Sekretaris BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

1. **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
2. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta keuangan dan asset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun kebutuhan ASN, pengadaan ASN, informasi kepegawaian, fasilitasi profesi ASN dan penataan arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. **Sub Bidang Formasi dan Pengadaan**, mempunyai tugas menyusun formasi pegawai ASN, dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan prosedur dan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. **Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian**, mempunyai tugas menyusun dan merencanakan rencana kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. **Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai**, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana fasilitasi kelembagaan profesi ASN, fasilitas pengelolaan administrasi, kepegawaian dan kegiatan organisasi serta menata arsip pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.1.4 Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi pada BKD Provinsi Maluku mempunyai tugas menyelenggarakan proses mutasi dan promosi, mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi, memverifikasi dokumen mutasi dan promosi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. **Sub Bidang Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian**, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian, serta menyusun data, informasi dan dokumentasi sesuai peraturan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. **Sub Bidang Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala**, mempunyai tugas menyusun dan mengelola proses Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. **Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi**, mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan karir dan promosi ASN, mengelola proses pengembangan karir dan promosi ASN serta menyusun pedoman pola karir dan DUK sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.1.5 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas merumuskan kebijakan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja aparatur, usulan pemberian penghargaan,

pembinaan disiplin dan kedudukan hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1. **Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola proses penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. **Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
3. **Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai**, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta memproses usulan pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.1.2 Struktur Organisasi

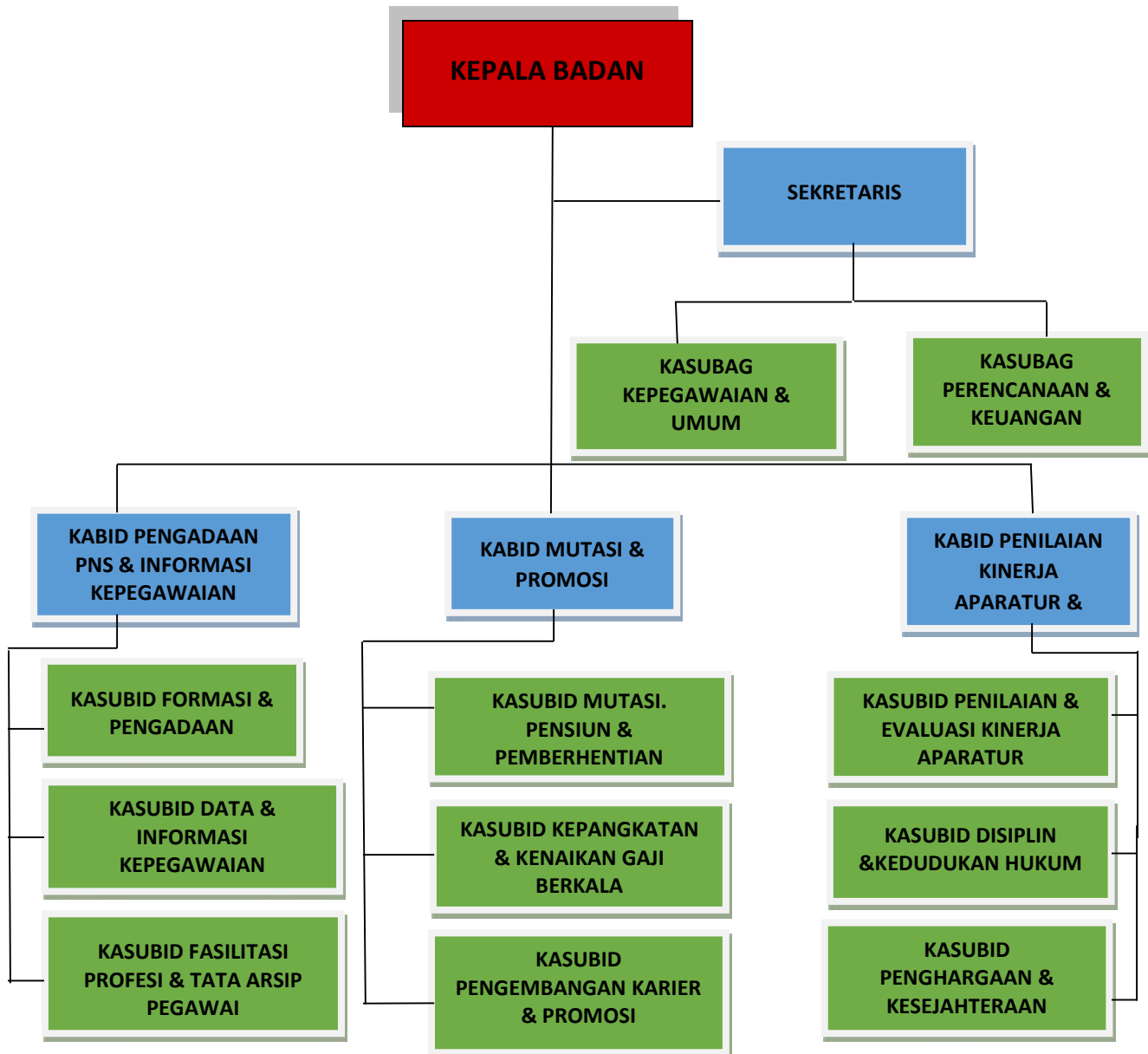
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN dan Tata Arsip Pegawai.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
- e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum; dan
 - 3) Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku harus didukung oleh Sumber Daya baik berupa Sumberdaya Aparatur maupun Sarana Prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berdasarkan keadaan per Januari 2019 sebanyak 58 Orang (*Sumber Simpeg Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku*) dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin pangkat/Golongan, Jenjang Pendidikan dan Eselon sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai BKD berdasarkan Jenis Kelamin

NO	b. Jenis Kelamin	JUMLAH	%
1	Pria	30	52%
2	Perempuan	28	48%
Jumlah		58	100%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

b. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Golongan/Kepangkatan :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BKD Menurut Golongan/Pangkat

NO	Golongan Ruang	JUMLAH	%
1	Golongan IV	5	9%
2	Golongan III	49	84%
3	Golongan II	4	7%
4	Golongan I	-	0%
Jumlah		58	100%

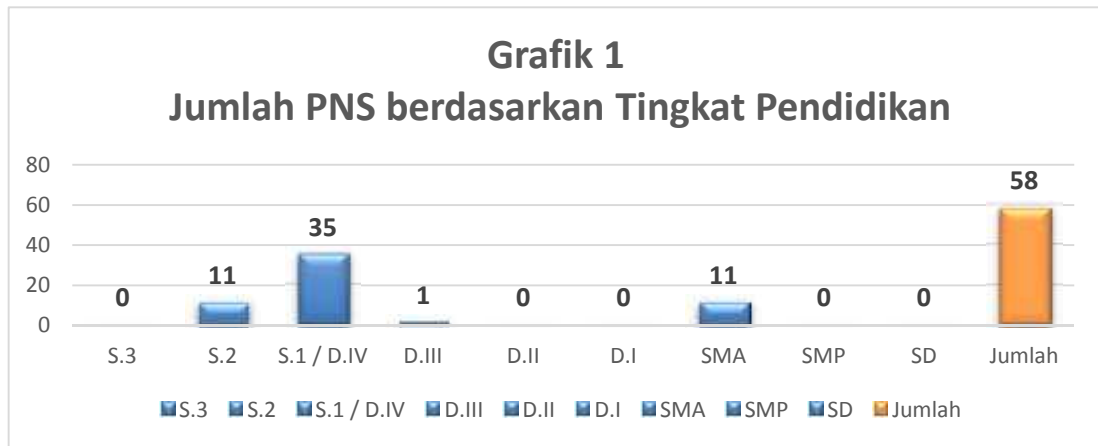
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

c. Jumlah Pegawai BKD berdasarkan Jenis Pendidikan :

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai BKD Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH	%
1	S.3	-	0%
2	S.2	11	19%
3	S.1 / D.IV	35	60%
4	D.III	1	2%
5	D.II	-	0%
6	D.I	-	0%
7	SMA	11	19%
8	SMP	-	0%
9	SD	-	0%
Jumlah		58	100%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

d. Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Eselon

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai BKD menurut Eselon

NO	JABATAN/ESELON	Tersedia	Terisi	Lowong	Ket.
1	Eselon II.a	1	-	1	
2	Eselon III.a	4	4	-	
3	Eselon IV.a	11	8	3	
Jumlah		16	12	4	

Sumber : Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

e. Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum

Tabel 2.5
Keadaan Pegawai BKD Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	-
2	Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana	46
Total		46

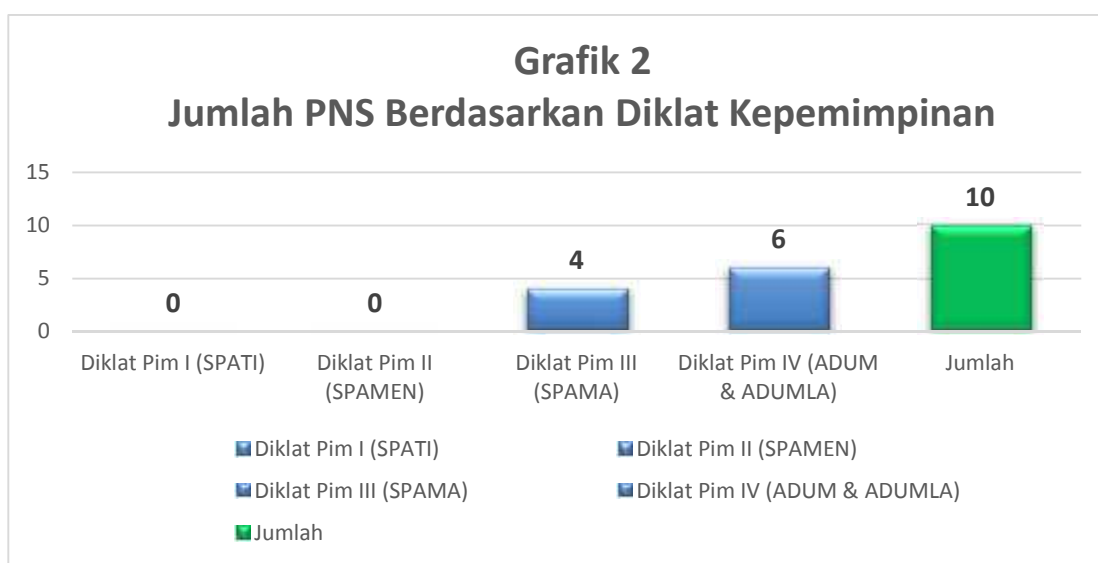
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

f. Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6
Keadaan Pegawai BKD berdasarkan Tingkat Diklat Penjenjangan

NO	Diklat Penjenjangan	JUMLAH	%
1	Diklat Pim I (SPATI)	-	0%
2	Diklat Pim II (SPAMEN)	-	0%
3	Diklat Pim III (SPAMA)	4	40%
4	Diklat Pim IV (ADUM & ADUMLA)	6	60%
Jumlah		10	100%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019



Sumber: Simpeg BKD Prov Maluku per Januari 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang telah diimplementasikan ke dalam Peraturan Gubernur sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Provinsi Maluku.
2. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.
3. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.
4. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Maluku.

Oleh sebab itu sesuai Peraturan Gubernur tersebut, maka masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus berusaha untuk merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang melalui proses penyusunan personalia yang dilaksanakan berjenjang dengan tujuan menjaga pemenuhan kebutuhan personalia pada seluruh unit (OPD, Badan dan lainnya). Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 10.526 PNS yang dapat diklasifikasi dalam tabel di bawah ini :

Tabel Tabel 2.7
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
01	Laki-laki	4.451	42,29
02	Perempuan	6.075	57,71
Total		10.526	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

Tabel 2.8
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Dirinci Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
01	S D	41	0,39
02	S L T P	60	0,57
03	S L T A	1.911	18,16
04	Diploma I	48	0,46
05	Diploma II	53	0,50
06	Diploma III	702	6,67
07	Diploma IV	106	1,01
08	Strata 1	6.949	66,02
09	Strata 2	649	6,16
10	Strata 3	7	0,06
Total		10.526	100,00

Sumber: Simpeg BKD Prov Maluku Per Januari 2019

Merujuk pada Tabel di atas, tampak bahwa dari 10.526 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi hingga tahun 2019, ternyata memiliki variasi yang cukup tinggi dari jenjang pendidikan. PNS yang menamatkan jenjang pendidikan SLTA dan Strata 1 (S1) ternyata jauh lebih banyak, jika dibanding PNS yang menamatkan jenjang pendidikan lainnya. Sebaliknya, PNS yang menamatkan jenjang pendidikan Strata 3 (S3) relatif lebih sedikit (hanya sebanyak 7 orang) dibanding PNS yang menamatkan jenjang pendidikan lainnya.

Jika dilihat dari kategori umur, jumlah PNS di lingkup Pemerintah Provinsi yang sudah berusia antara 36 s/d 40 tahun ternyata lebih banyak (21,75%) kemudian diikuti dengan PNS yang berusia antara 31 s/d 35 tahun (19,57%), jika dibanding dengan kategori usia PNS lainnya. Di samping itu, PNS yang berusia di atas 56 tahun sebanyak (8,48%), PNS yang masuk dalam kategori usia ini merupakan kategori usia dalam persiapan pensiun. Sedangkan PNS yang berusia antara 21 s/d 25 tahun lebih sedikit (0,91%) dibanding dengan kategori usia PNS yang lainnya. Untuk memperoleh pengetahuan secara utuh tentang hal tersebut, dapat dilihat pada data Tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Dirinci Berdasarkan Kategori Umur

No	Kategori Umur	Jumlah	%
1	21 - 25	96	0,91
2	26 - 30	311	2,95
3	31 - 35	1.422	13,51
4	36 - 40	2.289	21,75
5	41 - 45	2.060	19,57
6	46 - 50	1.608	15,28
7	51 - 55	1.847	17,55
8	56 +	893	8,48
Total		10.526	100,00

Sumber : BKD Provinsi Maluku Per Januari 2019

Apabila dicermati secara saksama untuk mengetahui jumlah PNS di Lingkup Provinsi Maluku yang terdistribusi berdasarkan Golongan/Ruang, data tabel dibawah ini menunjukkan kecenderungan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Dirinci Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah	%
	Golongan I		
1	Golongan I/a	2	3,12
2	Golongan I/b	8	12,50
3	Golongan I/c	23	35,94
4	Golongan I/d	31	48,44
Total		64	100
No	Golongan II		
1	Golongan II/a	186	14,31
2	Golongan II/b	276	21,23
3	Golongan II/c	484	37,23
4	Golongan II/d	354	27,23
Total		1.300	100
No	Golongan III		
1	Golongan III/a	1.003	14,07
2	Golongan III/b	1.969	27,62

3	Golongan III/c	2.428	34,05
4	Golongan III/d	1.730	24,26
Total		7.130	100
No	Golongan IV		
1	Golongan IV/a	1.112	54,72
2	Golongan IV/b	857	42,18
3	Golongan IV/c	41	2,02
4	Golongan IV/d	21	1,03
5	Golongan IV/e	1	0,05
Total		2.032	100
Total Keseluruhan		10.526	

Sumber : BKD Provinsi Maluku Per Januari 2019

Selanjutnya dilihat dari Diklat Penjenjangan yang telah diikuti oleh PNS yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi, diketahui bahwa dari 10.526 orang PNS yang ada hanya 556 orang saja yang sudah pernah mengikutinya. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 orang PNS yang telah mengikuti Diklat PIM Tingkat I. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
Dirinci Berdasarkan Diklat Penjenjangan Yang Telah Diikuti

No	Kategori Diklat Penjenjangan	Jumlah	%
01	Diklat PIM Tk. IV	344	61,87
02	Diklat PIM Tk. III	183	32,91
03	Diklat PIM Tk. II	27	4,86
04	Diklat PIM Tk. I	2	0,36
Total		556	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

Selanjutnya dari tabel di atas dapat dilihat juga jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM Tingkat IV jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM Tingkat III maupun Diklat PIM Tingkat II.

Dengan adanya pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV, III, II, dan I, dapat dijelaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas telah sesuai dengan klasifikasi Diklat. Selanjutnya berdasarkan data Tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tersedia adalah sebanyak 50 Jabatan, dan terisi sebanyak 35 Jabatan, sedangkan lowong adalah sebanyak 15 jabatan yang pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka. Jabatan struktural tersedia, terisi, dan lowong dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Jabatan Struktural Tersedia, Terisi, Lowong
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

No	Eselon	Tersedia	Terisi	Lowong
01	I a	0	0	0
02	I b	1	0	1
03	II a	39	26	13
04	II b	11	9	2
05	III a	236	187	49
06	III b	89	8	81
07	IV a	787	492	295
08	IV b	1	0	1
Total		1.164	722	442

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Per Januari 2019

Dari 1.164 jabatan yang tersedi ada 722 jabatan saja yang terisi sedangkan 442 jabatan yang belum terisi [lowong]. Kecenderungan lain yang tampak dari data tabel di atas adalah pada Eselon IV a dimana dari 787 Jabatan Struktural yang tersedia, ternyata hanya 492 saja yang sudah terisi, dan 295 yang belum terisi. Sedangkan pada Eselon IIIb dari 289 Jabatan yang tersedia hanya 8 jabatan yang terisi dan masih 81 jabatan yang masih lowong hal ini dikarenakan banyak jabatan pada UPTD dan Cabang Dinas yang baru belum terisi.

Apabila dilakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah dan distribusi PNS di seluruh Daerah Otonom yang ada di Provinsi Maluku, diketahui bahwa PNS yang ada sebanyak 47.963 orang. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah dan Distribusi PNS
Dirinci Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	%
01	Maluku Tengah	8.595	19,95
02	Seram Bagian Barat	4.943	11,48
03	Seram Bagian Timur	3.381	7,85
04	Maluku Barat Daya	3.099	7,19
05	Kepulauan Tanimbar	3.501	8,13
06	Maluku Tenggara	3.162	7,34
07	Kepulauan Aru	3.008	6,98
08	B u r u	4.088	9,49
09	Buru Selatan	2.315	5,37
10	T u a l	1.741	4,05
11	A m b o n	5.243	12,17
Total		43.074	100,00

Sumber : Buku Data Publikasi Kepegawaian Tahun 2018

Dari jumlah tersebut, di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon merupakan dua Kabupaten/Kota yang jumlah PNS lebih banyak (8.595 orang dan

12,17 orang) dibanding dengan jumlah PNS yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah PNS lebih sedikit dibanding dengan jumlah PNS yang ada di Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 2.14
Daftar Aset yang dikelola BKD Provinsi Maluku

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN HARGA	TOTAL HARGA
1.	Station Wagon (INNOVA)	1 Buah	Rp 370.866.000	Rp 370.866.000
2.	Station Wagon (INNOVA)	1 Buah	Rp 370.300.000	Rp 370.300.000
3.	Station Wagon (AVANZA)	1 Buah	Rp 245.844.000	Rp 245.844.000
4.	sepeda Motor (VARIO)	3 Buah	Rp 17.546.000	Rp 52.638.000
5.	AC 1 PK (Panasonic)	1 Buah	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
6.	Meja 1 Biro Lbh	7 Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000
7.	Kaca	1 Buah	Rp 200.000	Rp 200.000
8.	Kursi Sofa	1 Stel	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000
9.	Lemari Arsip	8 Buah	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
10.	TV	4 Buah	Rp 3.250.000	Rp 13.000.000
11.	Kursi Chirose	10 Buah	Rp 500.000	Rp 5.000.000
12.	Laptop	1 Buah	Rp 11.600.000	Rp 11.600.000
13.	Laptop Toshiba C40-A108	5 Buah	Rp 6.045.000	Rp 30.225.000
14.	Laptop P745	2 Buah	Rp 5.660.000	Rp 11.320.000
15.	Laptop Acer	5 Buah	Rp 6.975.000	Rp. 34.875.000
16.	HP Pavilion	1 Buah	Rp 8.050.000	Rp. 8.050.000
17.	Dell Inspiron G7	1 Buah	Rp 30.000.000	Rp. 30.000.000
18.	Printer	13 Buah	Rp 2.500.000	Rp 32.500.000
19.	Filling Kabinet	9 Buah	Rp 3.500.000	Rp 31.500.000
20.	Meja Komputer	50 Buah	Rp 1.500.000	Rp 75.000.000
21.	AC LG 1 PK	8 Buah	Rp 5.000.000	Rp 40.000.000
22.	Kursi Pejabat	5 Buah	Rp 2.250.000	Rp 11.250.000
23.	Kursi Komputer	80 Buah	Rp 300.000	Rp 24.000.000
24.	Kursi Tamu	20 Buah	Rp 500.000	Rp 10.000.000
25.	Lemari Arsip besar	2 Buah	Rp 98.000.000	Rp 196.000.000
26.	Meja Kerja 1/2 Biro	49 Buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
27.	Lemari Arsip Biasa	11 Buah	Rp 5.000.000	Rp 55.000.000
28.	Komputer HP 18	6 Buah	Rp 11.000.000	Rp 66.000.000
29.	Komputer HP Pavilion 20	50 Buah	Rp 15.000.000	Rp 750.000.000
30.	HP PC	6 Buah	Rp 7.500.000	Rp 45.000.000
31.	Brangkas	1 Buah	Rp 1.395.000	Rp 1.395.000
32.	Kulkas	1 Buah	Rp 2.720.000	Rp 2.720.000
33.	Finger Print	13 Buah	Rp 3.499.000	Rp 45.487.000
34.	Mesin Ketik	4 buah	Rp 1.400.000	Rp 5.600.000
35.	Mesin Nametag	2 Buah	Rp 24.900.000	Rp 49.800.000
36.	AC LG 5 PK Stand	3 Buah	Rp 41.500.000	Rp 124.500.000
27.	Layar	3 Buah	Rp 530.000	Rp 1.590.000
38.	Infokus Benq	2 Buah	Rp 6.846.000	Rp 13.692.000
39.	UPS	45 Buah	Rp 1.799.900	Rp 80.955.500

Sumber : Laporan Inventaris Aset BKD per Januari 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada periode 2014-2019 ditetapkan dengan indikator kinerja utama dalam perencanaan Strategis BKD periode 2014-2019

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Maluku periode 2014 - 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tersedianya jasa pengiriman surat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48.000 lbr	12 bln	7000 lbr	12 bln	12 bln	48.000 lbr	12 bln	7000 lbr	12 bln	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	40 Buku	-	-	-	-	40 Buku	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
				Tersedianya makanan dan minuman	40 kali	40 kali	15 kali	18 kali	18 kali	40 kali	40 kali	15 kali	12 kali	18 kali	100,00%	100,00%	100,00%	66,66%	100,00%
				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian	18 kali	13 kali	14 kali	9 kali	17 kali	18 kali	13 kali	14 kali	13 kali	11 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64,71%

				Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran (2015)	3 org	3 org	3 org	4 org	5 org	3 org	3 org	3 org	4 org	5 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya unit kendaraan dinas operasional	-	3 unit	2 unit	1 unit	-	3 unit	3 unit	2 unit	1 unit	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-
				Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	13 unit	6 unit	3 unit	-	-	13 unit	6 unit	3 unit	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-
				Tersedianya peralatan gedung kantor (2015)	113 unit	108 unit	17 unit	5 unit	9 unit	113 unit	108 unit	17 unit	5 unit	9 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya Mebeuler kantor	-	136 unit	45 unit	-	-	-	136 unit	45 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	1 unit	1 unit	5 unit	40 unit	12 bln	1 unit	1 unit	5 unit	40 unit	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terpeliharanya sarana gedung kantor	4 kali	50 kali	49 unit	5 unit	12 bln	4 kali	36 unit	49 Unit	5 unit	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya mobil sewa untuk operasional kantor	-	3 unit	-	-	-	-	3 unit	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
				Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	1600 bh	-	-	-	-	1600 bh	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
				Tersedianya pakaian olahraga pada unit kerja	-	-	60 bh	-	-	-	-	60 bh	-	-	-	100,00%	-	-	-
				Tersosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	-	5 kali	4 kali	1 kali	1 kali	-	5 kali	4 kali	1 kali	1 kali	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terselenggaranya bimbingan teknis	45 kali	5 kali	2 kali	2 kali	4 kali	45 kali	5 kali	2 kali	2 kali	9 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya dokumen renstra SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
				Tersedianya database pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	-	1 dok	1 dok	1 dok	100 org	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terlaksananya pembinaan Praja IPDN	171 org	8 kampus	9 kampus	100 org	100 org	171 org	8 kampus	9 kampus	83 org	17 org	100,00%	100,00%	100,00%	83,00%	17,00%
				Terlaksananya pendidikan penjenjangan struktural	4 org	3 org	2 org	-	3 org	0 org	2 org	5 org	5 org	3 org	100,00%	66,67%	100,00%	-	100,00%
				terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK	4500 org	2000 org	150 org	1000 peserta	400 org	4391 org	-	-	-	355 org	9758%	0,00%	0,00%	0,00%	88,75%
				Terlaksananya pengisian jabatan struktural	429 org	200 org	100 org	50 org	50 org	429 org	365 org	102 org	940 sk	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
				Tersedianya SK kenaikan pangkat PNS	2870 SK	1600 org	2500 org	1600 org	1000 org	1699 SK	1163 SK	2524 org	2636 org	1394 org	100,00%	72,69%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya data ASN secara online (simpeg) online	5110 org	5110 org	5171 org	13161 org	10850 org	5110 org	5133 org	5171 org	13161 org	10850 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	12 org	5110 PNS	5171 PNS	5016 pns	7 kasus	12 org	5133 org	4956 PNS	5016 pns	25 kasus	100,00%	100,00%	95,84%	100,00%	100,00%
				Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan bantuan belajar	46 org	42 org	30 org	33 org	20 org	46 org	42 org	23 org	38 org	27 org	100,00%	100,00%	76,66	100,00%	100,00%
				Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	20 kali	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	-	20 kali	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

				Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional	150 org	150 rorg	50 org	300 org	150 org	183 org	154 org	165 org	168 org	176 org	100,00%	100,00%	100,00%	56,00%	96,17%
				Terlaksananya pembinaan disiplin PNS	11 kab/kota	11 kab/kota	11 kab/kota	13161 pns	10850 org	11 kab/kota	11 kab/kota	5 kab/kota	13161 pns	10850 org	100,00%	100,00%	45,45%	100,00%	100,00%
				Tersedianya arsip fisik ASN	5210 org	1437 org	10181 org	13161 pns	1500 org	5210 org	5100 org	10181 org	6293 pns	1482 org	100,00%	100,00%	100,00%		98,80%
				Terlaksananya sumpah/janji PNS	310 org	300 org	150 org	100 org	150 org	316 org	210 org	320 org	473 org	450 org	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terpenuhinya pelayanan kepegawaian secara online dengan BKN melalui SAPK	-	5110 PNS	89 SKPD	92 skpd	47 SKPD	-	5113 PNS	89 skpd	92 skpd	47 SKPD	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Berbasis IT	-	5110 PNS	100 org	13161 pns	25 berita	-	5113 PNS	420 org	13161 pns	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
				Tersedianya SK CPNS/PNS, PPPTK, KGB dan PMK	-	1500 SK	1500 SK	6500 SK	1500 SK	-	1.773 SK	1584 sk	1614 SK	1207 SK	-	100,00%	100,00%	24,83%	80,47%
				Terpenuhinya Penataan Proses Pensiun PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Melalui SAPK	-	100 org	100 org	175 org	400 org	-	74 org	211 org	277 org	470 sk	-	74,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN	36 org	250 org	200 org	20 org	50 org	36 org	442 org	411 org	33 org	37 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,00%
				Tersedianya Tenaga Assesor bagi Kesiapan Pembangunan Assesment Center	9 org	2 org	1 org	-	-	9 org	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	-	-
				Terlaksananya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya	-	3 calon	-	-	-	-	7 calon	-	-	-	-	100,00%	-	-	-

				Terlaksananya Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	-	-	-	50 pns	50 pns	-	-	-	16 pns	-	-	-	-	32,00%	-
				Terlaksananya proses penataan PNS sesuai dengan Anjab dan ABK	-	-	-	-	500 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
				Tersedianya dokumen lembaga profesi ASN di Prov. Maluku	-	-	-	-	15 lembaga	-	-	-	-	2 Lembaga	-	-	-	-	13,33%
				Terlaksananya proses mutasi pindah ASN	-	-	-	-	75 org	-	-	-	-	702 org	-	-	-	-	100,00%
				Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat	300 org	300 org	100 org	-	100 org	166 org	-	100 org	-	94 PNS	55,33%	0,00%	100,00%	-	94,00%
				Terlaksananya proses P3D	-	-	6500 org	-	-	-	-	6237 org	-	-	-	-	95,95%	-	-
				Terfasilitasinya Penilaian Prestasi Kerja PNS	43 SKPD	12 ln	12 bln	12 bln	12 bln	43 SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Terpenuhinya pelaksanaan Forum Koordinasi BKD	150 PNS	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	150 PNS	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya Buku Publikasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Maluku	52 buku	50 buku	42 buku	35 buku	40 Buku	52 buku	50 buku	42 buku	35 buku	40 Buku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya buku biografi Gubernur Maluku	-	-	-	1 buku	-	-	-	-	1 buku	-	-	-	-	100,00%	-
				Tersedianya KARIS/ KARSU PNS	350 org	100 org	500	100 org	100 org	350 org	88 org	287 org	103	206 org	100,00%	88,00%	57,4%	100,00%	100,00%
				Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi PNS/ Non PNS	610 lbr	656 lbr	150 org	200 lbr	150 lbr	610 lbr	656 lbr	349 lbr	286	399 org	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

				Tersedianya Kartu Tanda Pengenal PNS (nametag)	1000 PNS	340 PNS	200 PNS	5000 PNS	600 PNS	1000 PNS	400 PNS	200 PNS	5000 PNS	2.000 PNS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya Karpeg/KPE	-	-		-	500 org	-	-	-	-	320 bh	-	-		-	64,00%
				Tersedianya perencanaan SDM ASN	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
				Tersedianya SOP	-	17 SOP		-	25 SOP	-	17 SOP	8 SOP	-	-	-	100,00%		-	0,00%
				Pemanfaatan fasilitas CAT untuk penambahan PAD	-	-		-	500 org	-	-	-	-	116 org	-	-	-	-	23,20%

Tabel 2.16
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah BKD Provinsi Maluku periode 2014 - 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan Tahun			
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tersedianya jasa pengiriman surat	15.000.000	23.747.000	19.600.000	15.805.000	15.603.300	15.000.000	23.747.000	19.580.000	15.785.550	15.603.300	100	100	99,9	99,88	100	0,58	(0,17)	(0,19)	(0,01)
Tersedianya jasa kebersihan kantor	12.500.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000	27.463.920	12.500.000	18.000.000	21.000.000	21.000.000	26.400.000	100	100	100	100	96,13	0,44	0,17	-	0,31
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	15.800.000	28.000.000	21.138.000	19.250.000	10.236.600	15.800.000	28.000.000	21.138.000	19.250.000	10.236.600	100	100	100	100	100	0,77	(0,25)	(0,09)	(0,47)
Tersedianya alat tulis kantor	135.000.000	386.300.000	476.574.000	224.850.000	76.632.939	135.000.000	384.050.000	469.874.000	224.850.000	76.362.900	100	99,42	98,59	100	99,65	1,86	0,23	(0,53)	(0,66)

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	37.000.000	59.060.000	43.000.000	22.177.000	36.062.100	37.000.000	59.060.000	42.970.000	22.177.000	36.062.100	100	100	99,93	100	100	0,60	(0,27)	(0,48)	0,63
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	20.600.000	-	-	-	-	17.839.700	-	-	-	-	86,6	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya makanan dan minuman	47.500.000	97.000.000	34.000.000	24.795.000	30.672.000	47.500.000	97.000.000	34.000.000	24.795.000	30.600.000	100	100	100	100	99,77	1,04	(0,65)	(0,27)	0,24
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian	228.600.000	165.100.000	194.900.000	134.700.000	264.280.000	178.227.400	134.128.000	161.880.400	112.993.500	171.102.900	77,96	81,24	83,06	83,89	64,74	(0,28)	0,18	(0,31)	0,96
Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	36.000.000	-	63.000.000	84.000.000	137.319.600	36.000.000	-	63.000.000	84.000.000	125.400.000	100	-	100	100	91,32	-	-	0,33	0,63
Tersedianya unit kendaraan dinas operasional	-	60.000.000	625.000.000	380.000.000	-	-	52.638.600	616.710.000	370.300.000	-	-	87,73	98,67	97,45	-	-	9,42	(0,39)	-
Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	185.250.000	130.000.000	115.000.000	-	-	173.750.000	129.000.000	114.000.000	-	-	93,79	99,23	99,13	-	-	(0,30)	(0,12)	-
Tersedianya peralatan gedung kantor	794.550.000	245.750.000	195.000.000	24.800.000	12.900.000	767.950.000	245.750.000	193.230.000	24.800.000	12.900.000	96,65	100	99,09	100	100	(0,69)	(0,21)	(0,87)	(0,48)
Tersedianya Mebeuler kantor	-	123.000.000	89.000.000	-	-	-	121.200.000	88.000.000	-	-	-	98,54	98,88	-	-	-	(0,28)	-	-
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	36.000.000	116.640.000	62.000.000	77.300.000	46.132.200	36.000.000	116.640.000	46.161.003	68.446.038	46.068.179	100	100	74,45	88,55	99,86	2,24	(0,47)	0,25	(0,40)
Terpeliharanya sarana gedung kantor	20.000.000	50.000.000	49.000.000	21.650.000	21.414.600	20.000.000	50.000.000	49.000.000	21.650.000	21.236.145	100	100	100	100	99,17	1,50	(0,02)	(0,56)	(0,01)

Tersedianya mobil sewa untuk operasional kantor	-	270.000.000	-	-	-	-	270.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	399.850.000	-	-	-	-	382.250.000	-	-	-	-	95,6	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya pakaian olahraga	-	-	15.000.000	-	-	-	-	14.940.000	-	-	-	-	99,6	-	-	-	-	-	-
Tersosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	-	337.848.000	293.320.000	132.440.000	40.905.000	-	308.780.900	262.975.400	121.242.500	38.263.800	-	91,4	89,65	91,55	93,54	-	(0,13)	(0,55)	(0,69)
Terselenggaranya bimbingan teknis	359.750.000	517.900.000	179.420.000	110.000.000	58.300.000	313.691.299	484.310.300	158.822.000	103.040.500	57.104.000	87,2	93,51	88,52	93,67	97,95	0,44	(0,65)	(0,39)	(0,47)
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	65.900.000	41.185.000	48.000.000	54.360.000	-	65.890.000	41.183.875	46.136.000	52.535.500	-	99,98	100	96,12	96,64	-	(0,38)	0,17	0,13
Tersedianya Renstra SKPD	119.775.000	-	-	-	-	119.775.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya database pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	-	42.000.000	72.500.000	40.500.000	40.628.025	-	41.998.250	67.907.000	40.500.000	40.628.025	-	100	93,66	100	100	-	0,73	(0,44)	0,00
Terlaksananya pembinaan Praja IPDN	308.412.000	327.548.000	207.500.000	160.000.000	91.346.625	283.920.000	312.135.000	181.644.200	140.022.740	81.445.125	92,06	95,29	87,54	87,51	89,16	0,06	(0,37)	(0,23)	(0,43)
Terlaksananya pendidikan penjenjangan struktural	11.900.000	221.500.000	347.000.000	-	133.500.000	11.578.200	182.705.810	317.072.850	-	108.428.603	97,3	82,49	91,38	-	81,22	17,61	0,57	-	-
terlaksananya seleksi CPNS dan PPK	702.445.000	164.338.000	181.282.000	100.000.000	758.799.000	592.889.000	158.595.337	170.184.100	83.860.963	544.554.960	84,4	96,51	93,88	83,86	71,77	(0,77)	0,10	(0,45)	6,59

Terlaksananya pengisian jabatan struktural	185.540.000	96.709.000	297.600.000	640.443.000	63.630.000	173.440.100	89.103.000	264.175.000	497.629.500	61.715.500	93,48	92,14	88,77	77,7	96,99	(0,48)	2,08	1,15	(0,90)
Tersedianya SK kenaikan pangkat PNS	628.200.000	322.900.000	210.000.000	233.624.000	233.909.910	551.248.900	300.917.400	167.644.118	198.792.400	203.726.300	87,75	93,19	79,83	85,09	87,1	(0,49)	(0,35)	0,11	0,00
Tersedianya data ASN secara online (simpeg) online	302.500.000	254.500.000	100.000.000	162.000.000	321.402.000	278.165.980	237.901.000	88.857.899	154.308.000	301.393.364	91,96	93,48	88,86	95,25	93,77	(0,16)	(0,61)	0,62	0,98
Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	148.900.000	147.900.000	80.500.000	68.000.000	31.612.500	139.740.400	139.759.604	73.984.000	59.539.000	28.241.800	93,85	94,5	91,91	87,56	89,34	(0,01)	(0,46)	(0,16)	(0,54)
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan bantuan belajar	1.226.830.000	928.450.000	506.039.000	1.072.467.000	887.398.550	1.100.268.600	874.119.200	475.939.800	1.042.898.527	820.239.242	89,68	94,15	94,05	97,24	92,43	(0,24)	(0,45)	1,12	(0,17)
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	462.900.000	307.220.000	210.980.000	259.590.000	-	441.811.700	267.366.000	175.935.000	243.179.000	-	95,44	87,03	83,39	93,68	-!	(0,34)	(0,31)	0,23
Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional	195.050.000	83.153.000	73.309.000	64.557.000	49.949.865	178.819.800	80.586.538	67.323.000	59.970.800	47.971.165	91,68	96,91	91,83	92,9	96,04	(0,57)	(0,12)	(0,12)	(0,23)
Terlaksananya pembinaan disiplin PNS	84.275.000	75.000.000	70.850.500	108.000.000	89.325.000	81.889.800	73.472.100	54.919.500	102.527.800	43.965.000	97,17	97,96	77,51	94,93	49,22	(0,11)	(0,06)	0,52	(0,17)
Tersedianya arsip fisik ASN	111.278.000	96.000.000	264.700.000	83.933.000	92.542.275	108.330.700	85.043.400	227.286.400	73.798.300	74.816.176	97,35	88,59	85,87	87,93	80,85	(0,14)	1,76	(0,68)	0,10
Terlaksananya sumpah/janji PNS	40.389.000	35.900.000	30.000.000	38.000.000	37.509.000	40.389.000	35.900.000	28.800.000	37.989.350	37.509.000	100	100	96	99,97	100	(0,11)	(0,16)	0,27	(0,01)
Terpenuhinya pelayanan kepegawaian secara online dengan BKN melalui SAPK	-	82.900.000	71.500.000	188.000.000	183.915.000	-	72.906.900	64.359.700	182.629.500	183.147.999	-	87,95	90,01	97,14	99,58	#VALUE!	(0,14)	1,63	(0,02)

Tersedianya Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Berbasis IT	-	72.900.000	187.500.000	33.000.000	15.273.000	-	67.888.400	181.824.400	29.004.000	15.143.000	-	93,13	96,97	87,89	99,15	-	1,57	(0,82)	(0,54)
Tersedianya SK CPNS/PNS, PPPTK, KGB dan PMK	-	-	45.500.000	45.500.000	13.549.500	-	-	43.225.500	41.117.000	13.410.000	-	-	95	90,37	98,97	-	-	-	(0,70)
Terpenuhinya Penataan Proses Pensiun PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Melalui SAPK	-	147.900.000	97.500.000	121.123.000	121.500.000	-	133.948.300	78.322.012	96.901.400	119.895.000	-	90,57	80,33	80	98,68	-	(0,34)	0,24	0,00
Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN	366.627.000	367.900.000	186.194.250	100.000.000	77.253.300	348.604.500	342.261.900	156.119.300	86.633.726	73.701.451	95,08	93,03	83,85	86,63	95,4	0,00	(0,49)	(0,46)	(0,23)
Tersedianya Tenaga Assesor bagi Kesiapan Pembangunan Assesment Center	65.775.000	48.267.000	23.700.750	-	-	65.575.000	45.407.100	21.193.000	-	-	99,7	94,07	89,42	-	-	(0,27)	(0,51)	-	-
Terlaksananya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	-	675.000.000	-	-	-	-	631.456.250	-	-	-	-	93,55	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	-	-	-	75.100.000	-	-	-	-	54.115.552	-	-	-	-	72,06	-	-	-	-	-
Terlaksananya proses penataan PNS sesuai dengan Anjab dan ABK	-	-	-	-	26.100.000	-	-	-	-	11.444.001	-	-	-	-	43,85	-	-	-	-

Tersedianya dokumen lembaga profesi ASN di Prov. Maluku	-	-	-	-	50.767.425	-	-	-	-	49.674.825	-	-	-	-	97,85	-	-	-	-
Terlaksananya proses mutasi pindah ASN	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	39.747.000	-	-	-	-	88,33	-	-	-	-
Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat	37.050.000	21.667.900	77.100.000	-	55.068.075	30.803.000	18.381.300	6.512.700	-	50.723.475	83,14	84,83	8,45	-	92,11	(0,42)	2,56	-	-
Terlaksananya proses P3D	-	-	120.000.000	-	-	-	-	94.736.538	-	-	-	-	78,95	-	-	-	-	-	-
Terfasilitasinya Penilaian Prestasi Kerja PNS	454.665.000	83.900.000	39.000.000	29.000.000	63.625.350	400.587.700	79.658.800	38.507.000	27.478.000	52.782.350	88,11	94,94	98,74	94,75	82,96	(0,82)	(0,54)	(0,26)	1,19
Terpenuhinya pelaksanaan Forum Koordinasi BKD	462.000.000	367.000.000	241.700.000	268.100.000	243.793.500	417.505.537	342.168.500	220.206.350	239.017.600	231.492.000	90,37	93,23	91,11	89,15	94,95	(0,21)	(0,34)	0,11	(0,09)
Tersedianya Buku Publikasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Maluku dan Kab/Kota se-Maluku	453.260.000	487.900.000	255.037.000	375.899.000	345.300.000	408.998.400	466.597.600	238.072.600	350.466.100	300.832.300	90,23	95,63	93,35	93,23	87,12	0,08	(0,48)	0,47	(0,08)
Tersedianya buku biografi Gubernur Maluku	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	242.039.159	-	-	-	-	96,82	-	-	-	-	-
Tersedianya KARIS/ KARSU PNS	120.300.000	62.900.000	55.550.000	55.508.000	46.875.600	110.625.200	57.147.800	51.200.000	49.733.200	44.713.600	91,96	90,86	92,17	89,6	95,39	(0,48)	(0,12)	(0,00)	(0,16)
Terpenuhinya pemberian penghargaan bagi PNS/ Non PNS	204.441.000	77.900.000	63.800.000	59.700.000	58.473.000	194.332.200	75.509.600	57.484.000	54.066.000	56.263.000	95,06	96,93	90,1	90,56	96,22	(61,90)	(0,18)	(0,06)	(0,02)
Tersedianya Kartu Tanda Pengenal PNS (nametag)	54.764.000	42.900.000	35.800.000	242.500.000	135.500.000	52.931.200	42.900.000	35.800.000	242.500.000	135.500.000	96,65	100	100	100	100	(0,22)	(0,17)	5,77	(0,44)

Tersedianya Karpeg/KPE	-	-	-	-	45.896.400	-	-	-	-	40.628.700	-	-	-	-	88,52	-	-	-	-
Tersedianya perencanaan SDM ASN	-	47.000.000	37.800.000	49.000.000	31.500.000	-	44.048.000	37.800.000	46.579.366	17.537.651	-	93,72	100	95,06	55,68	-	(0,20)	0,30	(0,36)
Tersedianya SOP	-	-	32.105.000	-	33.030.000	-	-	27.612.000	-	30.976.000	-	-	86,01	-	93,78	-	-	-	-
Pemanfaatan fasilitas CAT untuk penambahan PAD	-	-	-	-	14.465.000	-	-	-	-	14.465.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
TOTAL	8.022.076.000	9.014.777.900	6.870.424.500	6.330.701.000	5.530.310.159	7.305.086.916	8.507.363.289	6.239.543.645	5.804.519.071	4.839.766.036	91,06	94,37	90,82	91,69	87,51	0,12	(0,24)	(0,08)	(0,13)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebelumnya sudah melaksanakan pengembangan sistem pelayanan dan pembenahan berkelanjutan dalam pelayanan kepegawaian disemua bidang sesuai dengan standar mutu pelayanan, sehingga Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2017 telah dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku maupun BKPSDM Kabupaten/Kota se-Maluku. Pelayanan Kepegawaian berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan berupa e-Cuti, e-Kinerja, e-Arsip dan akan dikembangkan Absen Online serta terus memperluas ruang lingkup standar mutu pelayanan Kepegawaian.

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang dapat diberikan kepada OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Maluku maupun penggunaan layanan lainnya berupa :

- Layanan Sekretariat meliputi beberapa layanan sebagai berikut :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan makanan dan minuman
 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran
 9. Pengadaan peralatan gedung kantor
 10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 11. Pengadaan pakaian seragam PNS
 12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 14. Pemanfaatan fasilitas CAT (TKD)
 15. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 16. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 18. Penyusunan renstra SKPD
 19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 20. Forum koordinasi BKD
 21. Penyusunan buku publikasi kepegawaian
 22. Survei kepuasan pelayanan publik
 23. Pengelolaan Aset Badan
 24. Layanan Keuangan
 25. Layanan pelaporan keuangan
 26. Layanan Pelaporan Kinerja Badan
- Layanan Bidang Promosi dan Mutasi :
 1. Layanan pemrosesan bantuan izin belajar
 2. Layanan pemberian bantuan Tugas Belajar
 3. Layanan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
 4. Layanan Mutasi PNS

5. Layanan dalam penempatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
 6. Layanan dalam penempatan jabatan Fungsional
 7. Layanan penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten/Kota
 8. Layanan Kenaikan Pangkat
 9. Layanan Kenaikan Berkala
 10. Layanan pengiriman Peserta Diklat PIM Tingkat I, II, III dan IV
 11. Layanan Pengembangan Kapasitas SDM
 12. Layanan Promosi dan Kerjasama Pengukuran Kompetensi
 13. Layanan prosesing Pensiun dan Pemberhentian PNS
 14. Layanan Penyelesaian Keputusan Pensiun
 15. Layanan Persiapan Pensiun PNS
- Layanan Pengadaan dan Informasi Kepegawaian :
1. Layanan Penyusunan Formasi Pegawai
 2. Layanan Pengangkatan CPNS
 3. Layanan Fasilitasi CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan dan Pengujian Kesehatan
 4. Layanan Pengelolaan Aplikasi SIMPEG
 5. Layanan Data dan Informasi Kepegawaian
 6. Layanan Pengelolaan Jaringan Internet Lokal BKD Provinsi Maluku
 7. Layanan Database BKD Provinsi Maluku
 8. Layanan Pengelolaan Arsip Dokumentasi Kepegawaian PNS
 9. Layanan Pengelolaan Data Pegawai Elektronik
 10. Layanan Aplikasi Dokumen Pelayanan Elektronik
 11. Layanan Sertifikasi Profesi
- Layanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan :
1. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 2. Layanan Penelitian dan Penyusunan Satyalancana Karya Satya
 3. Layanan Pemrosesan Ijin Luar Negeri
 4. Layanan Bantuan Perawatan Bagi PNS
 5. Layanan Fasilitas Pengurusan JKK dan JKM
 6. Layanan Penyiapan Rencana Pengadaan PDH Pegawai
 7. Layanan Penilaian Kinerja Aparatur Daerah
 8. Layanan Pemberian Tambahan Penghasilan
 9. Layanan Fasilitasi Pengurusan Taperum
 10. Layanan Penyiapan Pegadaan Nametag Pegawai
 11. Layanan pengelolaan Karpeg, KARIS/KARSU, dan Kartu Peserta TASPEN
 12. Layanan Permohonan Ijin Cuti Pegawai

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, telah ditetapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, perbaikan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, peningkatan sistem aplikasi manajemen kepegawaian, pengukuran kompetensi pegawai dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta perlindungan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perjalanan pelaksanaan reformasi birokrasi masih menyisakan permasalahan-permasalahan dalam birokrasi pemerintah. Permasalahan strategis yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Layanan dibidang Kepegawaian	1.1 Perencanaan kebutuhan dan rekrutmen ASN belum berdasarkan kebutuhan objektif instansi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja	1.1.1 Moratorium penerimaan ASN sejak 2014 – 2018 1.1.2 Sinkronisasi dan integrasi sistem pengelolaan perencanaan kebutuhan ASN antar instansi pengelola baik pusat dan daerah belum optimal 1.1.3 Rendahnya tingkat kelulusan peserta seleksi penerimaan ASN baik SKD maupun SKB 1.1.4 Tidak adanya peserta seleksi penerimaan ASN untuk jabatan-jabatan tertentu
		1.2 Proses usul berkas pangkat, pensiun, mutasi dan ijin belajar tidak tepat waktu dan belum sesuai ketentuan peraturan	1.2.1 Rendahnya pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme 1.2.2 Kurangnya sosialisasi ketentuan tentang prosedur dan mekanisme tentang pengusulan pangkat, pension, mutasi dan ijin belajar

		1.3 Proses usul berkas pangkat, pension, mutasi dan ijin belajar tidak tepat waktu dan belum sesuai ketentuan peraturan	1.3.1 Penataan dan redistribusi ASN belum dilakukan 1.3.2 Pengangkatan dan promosi jabatan fungsional tertentu belum optimal dilakukan
		1.4 Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN belum ditegakan secara optimal	1.4.1 Kurangnya pemahaman atasan langsung ASN terhadap laporan dan penilaian kinerja ASN 1.4.2 Rendahnya kesadaran ASN tentang disiplin 1.4.3 Pengelolaan disiplin ASN belum optimal
		1.5 Penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN belum ditegakan secara optimal	1.5.1 Kurangnya pemahaman ASN terhadap laporan dan penilaian kinerja ASN 1.5.2 Rendahnya kesadaran terhadap penyampaian SKP dan penilaian capaian sasaran kerja
		1.6 Pelayanan Kesejahteraan ASN belum terkelola dengan baik	1.6.1 Belum adanya standar pelayanan kesejahteraan ASN 1.6.2 Kurangnya dana kesejahteraan bagi ASN
		1.7 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi belum terintegrasi dengan optimal	1.7.1 Pengelolaan data pegawai yang tidak terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota se Maluku maupun dengan BKN dan instansi pusat 1.7.2 Belum meratanya keadaan infrastruktur IT dan relatif masih mahal 1.7.3 Masih sangat terbatasnya tenaga SDM dibidang IT 1.7.4 Belum membudayanya pengambilan keputusan berdasarkan teknologi informasi dan perubahan mindset dan cultureset

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 merupakan aktualisasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi obyektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka Panjang daerah.

3.2.1 Visi

Visi pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yaitu :

“ Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

3.2.2 Misi

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019 – 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; dan
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Terkait dengan Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Misi ke-1 “ **Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani** ”.

Dari Misi ke-1 tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku akan melakukan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian antara lain pelayanan SIMPEG *online*, Peningkatan disiplin dan kinerja, serta pemberian motivasi berupa *reward* dan *punishment* agar terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja, disiplin, dan profesional.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Maluku

BKN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Hal ini diwujudkan dengan kewenangan yang dimiliki BKN sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu kewenangan dan tanggung jawab BKN diorientasikan kepada revitalisasi sistem dan manajemen birokrasi publik secara efisien, responsif dan fokus pada pencapaian kinerja, serta melakukan pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi. Di samping itu, BKN juga berperan strategis dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dengan mengelola hubungan kemitraan dengan Badan Kepegawaian Daerah dan pembangunan kantor BKN di tingkat regional.

Secara lebih jelas, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, BKN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. Peran ini merupakan penguatan dari peran sebelumnya yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Manajemen ASN yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
- h. Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
- i. Pelaksanaan bantuan hukum;
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
- k. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
- l. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- m. Disamping kedudukan, tugas, dan fungsi, BKN juga memiliki kewenangan :
- n. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang manajemen kepegawaian;
- o. Perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian untuk mendukung pembangunan secara makro;
- p. Penetapan sistem informasi di bidang manajemen kepegawaian;
- q. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Provinsi;
- r. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;
- t. Penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian dan pengendaliannya;
- u. Penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- v. Penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar provinsi, serta perumusan standar prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan,

- pemindahan, pemberhentian, penetapan standar, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan PNS;
- w. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
 - x. Perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan standar; dan
 - y. Pengawasan dan pengendalian norma, standard dan prosedur kepegawaian.

Dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Beberapa unsur yang sama dari visi dan rencana strategi baik Badan Kepegawaian Negara maupun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian guna mewujudkan Profesionalisme pegawai yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

Berkaitan dengan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, maka yang menjadi langkah strategi adalah pengaturan regulasi yang mendukung pengembangan PNS, sehingga terdapat keselarasan ketika pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya, kemudian daerah menindak lanjuti dengan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat. Sehingga ketercapaian kewenangan yang diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kabupaten/Kota serta database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
2. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian secara terencana dan terprogram.
3. Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan fungsional yang terkait dengan programmer, operator, dan analis kepegawaian.
4. Belum optimalnya penerapan aplikasi SIMPEG sebagai penunjang manajemen kepegawaian.

5. Belum terpenuhinya piranti dan jaringan yang sesuai standar sehingga belum terintegrasi secara maksimal.
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap pengembangan penghargaan kinerja pegawai sebagai sarana peningkatan motivasi pegawai.
7. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masing-masing individu pegawai.
8. Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika, dan perilaku pegawai.
9. Konsistensi dan penegakan aturan kepegawaian masih belum optimal.
10. Terbatasnya jumlah dan kesempatan peningkatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan database.
2. Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEG dalam menunjang manajemen kepegawaian.
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian.
4. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan SDM Aparatur.
5. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan Tupoksi .
6. Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan pidana pegawai.
7. Meningkatnya SDM aparatur yang lulus diklat kepegawaian.
8. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur.
9. Berlakunya sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur ASN.
10. Meningkatnya persentase CPNS yang berkualitas dan berkompentensi sesuai kebutuhan.
11. Peningkatan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan pelayanan kepegawaian.
12. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan merit sistem.
13. Adanya pengawasan intern (audit internal kepegawaian) oleh pimpinan secara rutinitas dalam pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian.
14. Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis sebagai hal-hal pada penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Komitmen Gubernur Maluku dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mengembangkan kompetensi;

3. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung *interlink* pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan instansi-instansi terkait;
4. Pengembangan sistem *reward* dan *punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
5. Tersedianya aparatur yang disiplin, professional dan memiliki kompetensi serta daya saing dalam berkinerja.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah Mewujudkan layanan kepegawaian yang profesional dan inovatif.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian kepada ASN secara terintegrasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudnya Layanan Kepegawaian yang Profesional	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian kepada ASN	Tersedia Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kelancaran tugas-tugas perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur	100 org	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org
			Peningkatan akuntabilitas laporan	1 dok	-	-	-	-	1 dok
			Jumlah Praja IPDN yang memperoleh pembinaan	75 org	105 org	-	105 org	-	105 org
			Persentase formasi CPNS sesuai kebutuhan	70%	72%	74%	76%	78%	80%
			Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	80%	82.9%	83%	84%	85%	86%
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	6 PNS	8 PNS	10 PNS	12 PNS	14 PNS	16 PNS
			Simpeg Online yang terintegrasi	-	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik melibatkan koordinasi tim kerja, menggunakan faktor pendukung, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang mungkin dihadapi agar gagasan terlaksana secara rasional, efisien dalam pendanaan dan mencapai tujuan secara efektif.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan			
Misi : 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Layanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN secara Terintegrasi	I. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi di bidang layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi	1.1 Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online (mutasi, pensiun, pengadaan PNS, kearsipan, cuti, kinerja, disiplin, dll) 1.2 Database kepegawaian yang terintegrasi antara BKD Provinsi Maluku dan BKPSDM Kabupaten/Kota Se Maluku melalui Simpeg Online 1.3 Database kepegawaian yang terintegrasi antar BKD Provinsi Maluku dengan database kepegawaian nasional BKN, Kemenpan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1.4 Peningkatan kualitas SDM di bidang teknologi informasi
		II. Penataan dan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	2.1 Penyediaan tenaga assessor 2.2 Melakukan assessment terhadap ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan 2.3 Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka dan talent pool
		III. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Kesejahteraan ASN	3.1 Pemberlakuan penyampaian laporan kinerja pegawai dan verifikasi secara online 3.2 Pemberlakuan absen secara online 3.3 Pemberlakuan cuti secara online 3.4 Penegakan disiplin 3.5 Kesejahteraan disiplin

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

6.1 Program Kegiatan

Administrasi pegawai merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara otomatis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan pegawai. Manajemen ASN adalah serangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses atau gagalnya program-program pembangunan pemerintah. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka perlu dirumuskan kebijakan-lebijakan strategis yang menjadi pedoman dalam perumusan dan operasionalisasi program dan kegiatan yang ada. Berikut program dan kegiatan yang menjadi jembatan untuk dapat mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut, yaitu :

6.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran

6.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan pakaian seragam PNS
4. Pengadaan pakaian batik
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Pemanfaatan fasilitas CAT (TKD)

6.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan
2. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Kepegawaian

6.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (Lakip) OPD
2. Penyusunan Renstra OPD

6.1.5 Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Program Pendidikan Kedinasan diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan praja IPDN
2. Penempatan tugas lulusan Praja IPDN

6.1.6 Program Pembinaan dan Pengembangan ASN

Program Pembinaan dan Pengembangan ASN diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Seleksi penerimaan CPNS dan PPPK
2. Penempatan Pegawai Negeri Sipil
3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
4. Proses kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

5. Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Pembinaan disiplin PNS
8. Penyelenggaraan sumpah janji PNS
9. Proses pelayanan keputusan PNS, KGB, PMK dan Penggunaan gelar
10. Proses Pensiun dan Pemberhentian PNS
11. Seleksi Calon Praja IPDN
12. Penataan PNS
13. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
14. Penyelenggaraan mutasi pindah ASN
15. Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
16. Konseling Kerja PNS
17. Penyediaan database pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
18. Pengembangan dan pelayanan jabatan fungsional
19. Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar
20. Verifikasi dan pengambilan berkas Pangkat, Mutasi dan Pensiun
21. Pembuatan Karis/Karsu
22. Pemberian penghargaan bagi PNS/ Non PNS
23. Pembuatan kartu tanda pengenal (nametag)
24. Pembuatan Karpeg/KPE
25. Proses penilaian prestasi kerja PNS
26. Pemulangan pegawai yang pensiun
27. Pembiayaan duka bagi ASN yang meninggal dunia
28. Pemindahan dalam tugas PNS
29. Pemberian cuti bagi ASN
30. Perencanaan SDM aparatur sipil negara (ASN)
31. Forum koordinasi BKD
32. Penyusunan buku publikasi kepegawaian
33. Survei kepuasan pelayanan publik
34. Pembinaan mental spiritual dan olahraga ASN
35. Pengusulan NIP CPNS dan PPPK
36. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

6.1.7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diarahkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Output yang hendak dicapai dari program ini berdasarkan kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan e-Governance (SIMPEG)

2. Penataan arsip PNS lingkup Provinsi Maluku
3. Penerapan sistem aplikasi kepegawaian (SAPK) online
4. Pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan Website Provinsi Maluku
5. Pembangunan dan pemanfaatan pusat publikasi informasi kepegawaian berbasis elektronik

6.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian kepada ASN.

6.3 Pendanaan Indikatif

Dalam mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Sehingga untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan, hakikatnya dijabarkan untuk merespons upaya penyelesaian masalah atau memenuhi kebutuhan khususnya dalam konteks kepegawaian. Adapun gambaran tentang program kerja dan kegiatan BKD Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
Mewujudnya Layanan Kepegawaian yang Profesional	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian kepada ASN	Persentase Kualitas layanan kepegawaian		Tersedianya Administrasi Perkantoran	Kelancaran tugas kedinasan	100%	488,056,142	100%	1,027,693,700	100%	1,079,552,383	100%	1,133,530,003	100%	1,190,206,503	100%	1,249,716,828	BKD	Ambon
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100 Jasa	12,942,000	87 Jasa	37,500,000	100 jasa	39,375,000	100 jasa	41,343,750	100 jasa	43,410,938	100 jasa	45,581,484	BKD	Ambon
				Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 orang	28,807,968	1 orang	32,509,908	1 orang	34,135,403	1 orang	35,842,174	1 orang	37,634,282	1 orang	39,515,996	BKD	Ambon
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 orang	8,490,000	1 orang	20,500,000	1 orang	21,525,000	1 orang	22,601,250	1 orang	23,731,313	1 orang	24,917,878	BKD	Ambon
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	50,570,810	12 bln	207,234,344	12 bln	218,070,060	12 bln	228,973,563	12 bln	240,422,241	12 bln	252,443,353	BKD	Ambon
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	12 bln	29,911,500	12 bln	60,000,000	12 bln	63,000,000	12 bln	66,150,000	12 bln	69,457,500	12 bln	72,930,375	BKD	Ambon
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	63 kali	75,000,000	77 kali	100,090,000	65 kali	105,094,500	65 kali	110,349,225	65 kali	115,866,686	65 kali	121,660,021	BKD	Ambon
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di bidang kepegawaian	11 kali	159,900,000	15 kali	374,800,000	14 kali	393,540,000	14 kali	413,217,000	14 kali	433,877,850	14 kali	455,571,743	BKD	Ambon
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	5 orang	122,433,864	5 orang	195,059,448	6 orang	204,812,420	6 orang	215,053,041	6 orang	225,805,693	6 orang	237,095,978	BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
				Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Tugas-Tugas Perkantoran	100%	151,485,100	100%	3,016,129,400	100%	2,481,377,870	100%	229,396,764	100%	223,866,602	100%	218,809,932	BKD	Ambon
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	5 unit	25,000,000	3 unit	15,000,000	8 unit	40,000,000	5 unit	25,000,000	2 unit	10,000,000	BKD	Ambon
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 unit	96,470,000	79 unit	970,960,000	5 unit	50,000,000	5 unit	52,500,000	5 unit	55,125,000	5 unit	57,881,250	BKD	Ambon
				Pengadaan pakaian seragam PNS	Tersedianya pakaian seragam PNS	-	-	4740 PNS	1,896,000,000	5715 PNS	2,286,000,000	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 unit	37,313,600	6 unit	94,169,400	6 unit	98,877,870	6 unit	103,821,764	6 unit	109,012,852	6 unit	114,463,494	BKD	Ambon
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	40 unit	17,701,500	40 unit	30,000,000	40 unit	31,500,000	40 unit	33,075,000	40 unit	34,728,750	40 unit	36,465,188	BKD	Ambon
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur	100 org	98,950,000	3 org	90,000,000	3 org	194,500,000	3 org	199,225,000	3 org	204,186,250	3 org	209,395,563	BKD	Ambon
				Sosialisasi peraturan perundangan-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian	2 kali	34,000,000	-	-	1 kali	100,000,000	-	-	1 kali	100,000,000	-	-	BKD	Ambon
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan keterampilan aparatur	3 kali	64,950,000	-	-	-	-	1 kali	100,000,000	-	-	1 kali	100,000,000	BKD	Ambon
				Pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional Kepegawaian	Meningkatnya pengetahuan aparatur	-	-	3 org	90,000,000	3 org	94,500,000	3 org	99,225,000	3 org	104,186,250	3 org	109,395,563	BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
				Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan	1 Dok	100,605,000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	72,500,000	BKD	Ambon
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dok	45,005,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon
				Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya renstra SKPD	1 dok	55,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	72,500,000	BKD	Ambon
				Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Praja yang memperoleh Pembinaan	75 org	181,587,000	105 org	503,449,750	-	252,500,000	105 org	583,375,000	-	357,881,250	105 org	702,937,813	BKD	Ambon
				Pembinaan praja IPDN	Meningkatnya pemahaman praja IPDN	3 kampus	95,750,000	105 org	265,000,000	-	-	105 org	278,250,000	-	-	105 org	292,162,500	BKD	Ambon
				Penempatan tugas lulusan Praja IPDN	Terlaksananya penempatan lulusan Praja IPDN	-	-	50 org	50,000,000	50 org	52,500,000	50 org	55,125,000	50 org	57,881,250	50 org	60,775,313	BKD	Ambon
				Seleksi Calon Praja IPDN	Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN	30 Capra	85,837,000	40 Capra	188,449,750	35 Capra	200,000,000	37 Capra	250,000,000	40 Capra	300,000,000	42 Capra	350,000,000	BKD	Ambon
				Program Pembinaan dan Pengembangan ASN			5,036,485,058		5,082,733,500		5,732,931,645		6,180,949,840		6,666,265,581		6,928,611,860	BKD	Ambon
					Persentase Formasi CPNS sesuai kebutuhan	70%		72%		74%		76%		78%		80%		BKD	Ambon
					Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	80%		82.9%		83%		84%		85%		86%		BKD	Ambon
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar	6 PNS		8 PNS		10 PNS		12 PNS		14 PNS		16 PNS		BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
				Seleksi penerimaan CPNS dan PPPK	Tersedianya CPNS dan PPPK	400 ASN	738,909,000	496 ASN	663,099,000	425 ASN	800,000,000	450 ASN	850,000,000	400 ASN	900,000,000	550 ASN	950,000,000	BKD	Ambon
				Penempatan Pegawai Negeri Sipil	Tersedianya PNS dalam Jabatan	125 org	1,183,543,308	100 org	600,000,000	100 org	630,000,000	100 org	661,500,000	100 org	694,575,000	100 org	729,303,750	BKD	Ambon
				Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Tersedianya SK Kenaikan Pangkat Otomatis	3.000 SK	349,000,000	3.000 SK	329,999,700	3000 SK	450,000,000	3000 SK	475,000,000	3.000 SK	475,000,000	3.000 SK	475,000,000	BKD	Ambon
				Proses kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesainya kasus Pelanggaran Disiplin PNS	70 Kasus	116,593,000	70 Kasus	120,000,000	65 Kasus	126,000,000	60 Kasus	132,300,000	55 Kasus	138,915,000	50 Kasus	145,860,750	BKD	Ambon
				Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan	Terwujudnya SDM Aparatur yang Berkualitas handal dan profesional	13 org	635,680,000	10 org	525,000,000	15 org	551,250,000	20 org	578,812,500	25 org	607,753,125	30 org	638,140,781	BKD	Ambon
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya penyelesaian masalah-masalah kepegawaian	4 kali	168,783,000	11 kab/kota	318,783,000	11 kab/kota	334,722,150	11 kab/kota	351,458,258	11 kab/kota	369,031,170	11 kab/kota	387,482,729	BKD	Ambon
				Pengembangan dan pelayanan jabatan fungsional	Terlaksananya pengembagan dan pelayanan jabatan fungsional	300 org	60,125,000	400 org	100,000,000	400 org	105,000,000	400 org	110,250,000	400 org	115,762,500	400 org	121,550,625	BKD	Ambon
				Pembinaan disiplin PNS	Peningkatan Disiplin PNS	65 ASN	116,386,200	60 ASN	139,024,800	50 ASN	145,976,040	50 ASN	153,274,842	45 ASN	160,938,584	40 ASN	168,985,513	BKD	Ambon
				Penyelenggaraan sumpah janji PNS	Terpenuhinya Persyaratan dalam pengangkatan sebagai PNS	500 ASN	61,837,750	450 ASN	68,021,500	350 ASN	71,422,575	300 ASN	74,993,704	300 ASN	78,743,389	300 ASN	82,680,558	BKD	Ambon
				Proses pelayanan keputusan PNS, KGB, PMK dan Penggunaan gelar	Tersedianya SK PNS, KGB, PMK dan Penggunaan Gelar	10.400 SK	34,138,500	2000 SK	49,999,900	2000 SK	70,000,000	2000 SK	75,000,000	2000 SK	80,000,000	2000 SK	90,000,000	BKD	Ambon
				Proses Pensiun dan Pemberhentian PNS	Tersedianya SK Pensiun dan Pemberhentian	400 SK	200,750,000	400 SK	210,000,000	400 SK	230,000,000	400 SK	300,000,000	400 SK	325,000,000	400 SK	330,000,000	BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target			(Rp)
				Penataan PNS	Tersedianya Dokumen Penataan PNS	1 dok	21,648,500	1 dok	50,000,000	-	-	1 dok	50,000,000	-	-	1 dok	50,000,000	BKD	Ambon
				Pembinaan dan pengembangan profesi ASN	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN	1 kali	306,820,000	2 kali	585,000,000	3 Kali	614,250,000	3 Kali	644,962,500	3 Kali	677,210,625	3 Kali	711,071,156	BKD	Ambon
				Penyelenggaraan mutasi pindah ASN	Tersedianya SK Mutasi Pindah ASN	500 SK	47,325,000	550 SK	100,000,000	550 SK	130,000,000	575 SK	175,000,000	575 SK	200,000,000	575 SK	220,000,000	BKD	Ambon
				Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	100 org	65,150,000	-	-	100 org	100,000,000	-	-	100 org	100,000,000	-	-	BKD	Ambon
				Konseling Kerja PNS	Tersedianya hasil konseling kerja	20 ASN	38,986,400	20 ASN	80,100,100	10 ASN	84,105,105	10 ASN	88,310,360	10 ASN	92,725,878	10 ASN	97,362,172	BKD	Ambon
				Penyediaan database pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Tersedianya Dokumen data base Diklat Struktural dan Fungsional	1 dok	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon
				Pembuatan Karis/Karsu	Tersedianya Karis/Karsu	150 Kartu	68,880,500	300 Kartu	100,000,000	300 Kartu	105,000,000	300 Kartu	110,250,000	300 Kartu	115,762,500	300 Kartu	121,550,625	BKD	Ambon
				Pemberian penghargaan bagi PNS/ Non PNS	Terlaksananya pemberian Penghargaan bagi PNS/ Non PNS	150 orang	101,100,000	350 orang	166,855,000	370 orang	162,012,750	400 orang	188,735,000	370 orang	184,190,000	330 orang	167,682,500	BKD	Ambon
				Pembuatan kartu tanda pengenal (nametag)	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal (Nametag)	400 Nametag	16,806,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon
				Pembuatan Karpeg/KPE	Tersedianya Karpeg/KPE	150 Kartu	55,468,000	300 Kartu	112,880,500	300 Kartu	118,524,525	300 Kartu	124,450,751	300 Kartu	130,673,289	300 Kartu	137,206,953	BKD	Ambon
				Proses penilaian kerja PNS	Terlaksananya Proses Penilaian Kinerja PNS	200 ASN	80,882,650	600 ASN	88,970,000	800 ASN	93,418,500	1000 ASN	98,089,425	1200 ASN	102,993,896	1400 ASN	108,143,591	BKD	Ambon
				Pembiayaan duka bagi ASN yang meninggal dunia	Terlaksananya Pemberian Duka Bagi ASN yang Meninggal	-	-	15 ASN	115,000,000	20 ASN	120,750,000	20 ASN	126,787,500	20 ASN	133,126,875	20 ASN	139,783,219	BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab PD Unit Kerja	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
				Perencanaan SDM aparatur sipil negara (ASN)	Tersedianya Kebutuhan SDM Aparatur	400 ASN	26,127,500	450 ASN	100,000,000	425 ASN	150,000,000	450 ASN	200,000,000	500 ASN	250,000,000	550 ASN	300,000,000	BKD	Ambon
				Forum koordinasi BKD	Terlaksananya Forkum Koordinasi BKD	2 kali	191,400,000	2 kali	220,000,000	2 kali	231,000,000	2 kali	242,550,000	2 kali	254,677,500	2 kali	267,411,375	BKD	Ambon
				Penyusunan buku publikasi kepegawaian	Tersedianya Buku Publikasi Kepegawaian	50 buku	314,144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon
				Survei kepuasan pelayanan publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Pelayanan Publik	500 org	21,000,000	-	-	-	-	-	-	1 kali	50,000,000	-	-	BKD	Ambon
				Pembinaan mental spiritual dan olahraga ASN	Terlaksananya pembinaan mental spiritual dan olahraga	-	-	24 kali	50,000,000	24 kali	65,000,000	24 kali	70,000,000	24 kali	75,000,000	24 kali	80,000,000	BKD	Ambon
				Pengusulan NI CPNS dan PPPK	Terlaksananya Pengusulan NIP CPNS dan PPPK	-	-	396 ASN	100,000,000	425 ASN	150,000,000	450 PNS	200,000,000	500 ASN	250,000,000	550 ASN	300,000,000	BKD	Ambon
				Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	-	-	4 Produk Hukum	90,000,000	4 Produk Hukum	94,500,000	4 Produk Hukum	99,225,000	4 Produk Hukum	104,186,250	4 Produk Hukum	109,395,563	BKD	Ambon
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Simpeg Online yang Terintegrasi	-	1,090,104,000	11 Kab/ Kota	1,383,400,500	11 Kab/ Kota	1,800,000,000	11 Kab/ Kota	1,900,000,000	11 Kab/ Kota	2,000,000,000	11 Kab/ Kota	2,100,000,000	BKD	Ambon
				Pengembangan e-Governance (SIMPEG)	Tersedianya Pengembangan e-Governance (SIMPEG)	10.400 PNS	571,540,250	3 Aplikasi	808,533,500	3 Aplikasi	900,000,000	3 Aplikasi	850,000,000	3 Aplikasi	850,000,000	3 Aplikasi	850,000,000	BKD	Ambon
				Penataan arsip PNS lingkup Provinsi Maluku	Tersedianya Arsip Fisik ASN	4.954 PNS	227,500,000	10.100 PNS	178,717,000	10.100 PNS	300,000,000	10.100 PNS	350,000,000	10.100 PNS	400,000,000	10.100 PNS	400,000,000	BKD	Ambon
				Penerapan sistem aplikasi kepegawaian (SAPK) online	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian secara Online dengan BKN melalui SAPK	10.500 PNS	236.635.000	10.500 PNS	230,000,000	10.400 PNS	300,000,000	10.100 PNS	350,000,000	10.000 PNS	350,000,000	9.900 PNS	350,000,000	BKD	Ambon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab PD Unit Kerja	Loasik		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
				Pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan Website Provinsi Maluku	Meningkatnya Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	50 Info Publik	29,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Ambon	
				Pembangunan dan Pemanfaatan pusat publikasi informasi kepegawaian berbasis elektronik	Tersedianya publikasi informasi kepegawaian berbasis elektronik	-	-	150 info	100,000,000	200 info	150,000,000	200 info	200,000,000	200 info	250,000,000	300 info	300,000,000	BKD	Ambon
				Pemanfaatan fasilitas CAT (TKD)	Pemanfaatan fasilitas CAT untuk penambahan PAD	400 org	24,498,750	600 org	66,150,000	300 org	150,000,000	600 org	150,000,000	300 org	150,000,000	400 org	200,000,000	BKD	Ambon
TOTAL							7,147,272,300		11,103,406,850		11,540,861,898		10,226,476,607		10,642,406,186		11,481,971,996	BKD	Ambon

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Draf Rancangan Awal RPJMD. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Kinerja ASN	%	90.23	90.50	91.00	91.75	92.50	92.75	93.00
2	Persentase Disiplin ASN	%	92.50	92.70	92.90	93.10	93.50	93.80	94.00
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal	%	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	72.67	76.90	81.12	85.35	89.57	93.80	98.02
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	PNS	40	50	50	50	50	50	50
6	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintahan	PNS	761	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281
7	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	5,834	5,778	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

RUMUS :

1. Persentase Kinerja ASN

1. Nilai capaian kinerja PNS (Januari-Desember) : 12 Bulan
2. Jumlah Hasil (1) seluruh PNS : Jumlah PNS

2. Persentase Disiplin ASN

1. Jumlah PNS – Jumlah Pelangar
2. Hasil (1) : Jumlah PNS x 100

3. Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan Formal

Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar : Jumlah ASN X 100

4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat : Jumlah ASN dalam jabatan x 100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BKD Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat/*stakeholders* yang ada, khususnya di bidang kepegawaian. Rencana strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh ASN BKD Provinsi Maluku karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja akan tetapi menjadi pencerminan tuntutan pembangunan sesuai Visi dan Misi Daerah yang ingin dicapai.

Rencanan Perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Maluku. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang dim lingkungan BKD Provinsi Maluku selama kurun waktu 2019 – 2024 berpedoman pada Renstra ini.

Dalam rangka implementasi dokumen ini secara tepat guna dan berhasil guna, maka perlu ditegaskan kembali tentang pentingnya sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, yakni taat asas dan disiplin, efektif dan efisien, transparansi dan akuntabel, koordinasi dan sinkronisasi, serta berkesinambungan. Oleh sebab itu, diharapkan semua aparat jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dapat memahami dan menerapkan gagasan-gagasan obsesif di dalam dokumen Renstra ini sehingga bisa bersinergi dengan Renstra-Renstra Perangkat Daerah lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana yang ditegaskan pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BKD Provinsi Maluku ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Maluku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku,



Drs. JASMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741226 199412 1 003

LAMPIRAN RENSTRA BKD PROVINSI MALUKU

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran tugas kedinasan	12 bln	488,056,142	12 bln	1,027,693,700	12 bln	1,079,552,383	12 bln	1,133,530,003	12 bln	1,190,206,503	12 bln	1,249,716,828
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100 Jasa	12,942,000	87 Jasa	37,500,000	100 jasa	39,375,000	100 jasa	41,343,750	100 jasa	43,410,938	100 jasa	45,581,484
Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 orang	28,807,968	1 orang	32,509,908	1 orang	34,135,403	1 orang	35,842,174	1 orang	37,634,282	1 orang	39,515,996
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 orang	8,490,000	1 orang	20,500,000	1 orang	21,525,000	1 orang	22,601,250	1 orang	23,731,313	1 orang	24,917,878
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	50,570,810	12 bln	207,234,344	12 bln	218,070,060	12 bln	228,973,563	12 bln	240,422,241	12 bln	252,443,353
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersediaya barang cetakan dan pengadaan	12 bln	29,911,500	12 bln	60,000,000	12 bln	63,000,000	12 bln	66,150,000	12 bln	69,457,500	12 bln	72,930,375
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	63 kali	75,000,000	77 kali	100,090,000	65 kali	105,094,500	65 kali	110,349,225	65 kali	115,866,686	65 kali	121,660,021
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di bidang kepegawaian	11 kali	159,900,000	15 kali	374,800,000	14 kali	393,540,000	14 kali	413,217,000	14 kali	433,877,850	14 kali	455,571,743
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	5 orang	122,433,864	6 orang	195,059,448	6 orang	204,812,420	6 orang	215,053,041	6 orang	225,805,693	6 orang	237,095,978

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja aparatur	12 unit	151,485,100	100%	3,016,129,400	100%	2,481,377,870	100%	229,396,764	100%	223,866,602	100%	218,809,932
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	5 unit	25,000,000	3 unit	15,000,000	8 unit	40,000,000	5 unit	25,000,000	2 unit	10,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 unit	96,470,000	79 unit	970,960,000	5 unit	50,000,000	5 unit	52,500,000	5 unit	55,125,000	5 unit	57,881,250
Pengadaan pakaian seragam PNS	Tersedianya pakaian seragam PNS	-	-	4740 PNS	1,896,000,000	5715 PNS	2,286,000,000	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 unit	37,313,600	6 unit	94,169,400	6 unit	98,877,870	6 unit	103,821,764	6 unit	109,012,852	6 unit	114,463,494
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	40 unit	17,701,500	40 unit	30,000,000	40 unit	31,500,000	40 unit	33,075,000	40 unit	34,728,750	40 unit	36,465,188
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur	100 org	98,950,000	100 org	90,000,000	100 org	194,500,000	100 org	199,225,000	100 org	204,186,250	100 org	209,395,563
Sosialisasi peraturan perundangan-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian	2 kali	34,000,000	-	-	1 kali	100,000,000	-	-	1 kali	100,000,000	-	-

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan keterampilan aparatur	3 kali	64,950,000	-	-	-	-	1 kali	100,000,000	-	-	1 kali	100,000,000
Pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional Kepegawaian	Meningkatnya pengetahuan aparatur	-	-	5 org	90,000,000	5 org	94,500,000	5 org	99,225,000	5 org	104,186,250	5 org	109,395,563
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan	1 Dok	100,605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	72,500,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dok	45,005,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya renstra SKPD	1 dok	55,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	72,500,000
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Praja yang memperoleh Pembinaan	75 org	183,587,000	105 org	503,449,750	-	252,500,000	105 org	583,375,000	-	357,881,250	105 org	702,937,813
Pembinaan praja IPDN	Meningkatnya pemahaman praja IPDN	3 kampus	97,750,000	105 org	265,000,000	-	-	105 org	278,250,000	-	-	105 org	292,162,500
Penempatan tugas lulusan Praja IPDN	Terlaksananya penempatan lulusan Praja IPDN	-	-	50 org	50,000,000	50 org	52,500,000	50 org	55,125,000	50 org	57,881,250	50 org	60,775,313
Seleksi Calon Praja IPDN	Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN	30 Capra	85,837,000	40 Capra	188,449,750	35 Capra	200,000,000	37 Capra	250,000,000	40 Capra	300,000,000	42 Capra	350,000,000

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Program Pembinaan dan Pengembangan ASN			5,036,485,058		5,082,733,500		5,732,931,645		6,180,949,840		666,265,581		6,928,611,860
	Persentase Formasi CPNS sesuai Kebutuhan	70%		72%		74%		76%		78%		80%	
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	80%		82.90%		83%		84%		85%		86%	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	6 PNS		8 PNS		10 PNS		12 PNS		14 PNS		16 PNS	
Seleksi penerimaan CPNS dan PPPK	Tersedianya CPNS dan PPPK	400 ASN	738,909,000	391 ASN	663,099,000	425 ASN	800,000,000	450 ASN	850,000,000	500 ASN	900,000,000	550 ASN	950,000,000
Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	Tersedianya PNS dalam Jabatan	125 org	1,183,543,308	100 org	600,000,000	100 org	630,000,000	100 org	661,500,000	100 org	694,575,000	100 org	729,303,750
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Tersedianya SK Kenaikan Pangkat Otomatis	3.000 SK	349,000,000	3.000 SK	329,999,700	3000 SK	450,000,000	3000 SK	475,000,000	3.000 SK	475,000,000	3.000 SK	475,000,000
Proses kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus Pelanggaran Disiplin PNS	70 Kasus	116,593,000	70 Kasus	120,000,000	65 Kasus	126,000,000	60 Kasus	132,300,000	55 Kasus	138,915,000	50 Kasus	145,860,750
Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan	Terwujudnya SDM Aparatur yang Berkualitas handal dan profesional	13 org	635,680,000	10 org	525,000,000	15 org	551,250,000	20 org	578,812,500	25 org	607,753,125	30 org	638,140,781

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya penyelesaian masalah-masalah kepegawaian	4 kali	168,783,000	45 OPD	318,783,000	45 OPD	334,722,150	45 OPD	351,458,258	45 OPD	369,031,170	45 OPD	387,482,729
Pengembangan dan pelayanan jabatan fungsional	Terlaksananya pengemabgan dan pelayanan jabatan fungsional	300 org	60,125,000	400 org	100,000,000	400 org	105,000,000	400 org	110,250,000	400 org	115,762,500	400 org	121,550,625
Pembinaan disiplin PNS	Peningkatan Disiplin PNS	65 ASN	116,386,200	60 ASN	139,024,800	50 ASN	145,976,040	50 ASN	153,274,842	45 ASN	160,938,584	40 ASN	168,985,513
Penyelenggaraan sumpah janji PNS	Terpenuhiya Persyaratan dalam pengangkatan sebagai PNS	500 ASN	61,837,750	450 ASN	68,021,500	350 ASN	71,422,575	300 ASN	74,993,704	300 ASN	78,743,389	300 ASN	82,680,558
Proses pelayanan keputusan PNS, KGB, PMK dan Penggunaan gelar	Tersedianya SK PNS, KGB, PMK dan Penggunaan Gelar	10.400 SK	34,138,500	2000 SK	49,999,900	2000 SK	70,000,000	2000 SK	75,000,000	2000 SK	80,000,000	2000 SK	90,000,000
Proses Pensiun dan Pemberhentian PNS	Tersedianya SK Pensiun dan Pemberhentian	400 SK	200,750,000	400 SK	210,000,000	400 SK	230,000,000	400 SK	300,000,000	400 SK	325,000,000	400 SK	330,000,000
Penataan PNS	Tersedianya Dokumen Penataan PNS	1 dok	21,648,500	1 dok	50,000,000	-	-	1 dok	50,000,000	-	-	1 dok	50,000,000
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN	1 kali	306,820,000	2 kali	585,000,000	3 Kali	614,250,000	3 Kali	644,962,500	3 Kali	677,210,625	3 Kali	711,071,156
Penyelenggaraan mutasi pindah ASN	Tersedianya SK Mutasi Pindah ASN	500 SK	47,325,000	550 SK	100,000,000	550 SK	130,000,000	575 SK	175,000,000	575 SK	200,000,000	575 SK	220,000,000

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	100 org	65,150,000	-	-	100 org	100,000,000	-	-	100 org	100,000,000	-	-
Konseling Kerja PNS	Tersedianya hasil konseling kerja	20 ASN	38,986,400	20 ASN	80,100,100	10 ASN	84,105,105	10 ASN	88,310,360	10 ASN	92,725,878	10 ASN	97,362,172
Penyediaan database pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Tersedianya Dokumen data base Diklat Struktural dan Fungsional	1 dok	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Karis/Karsu	Tersedianya Karis/Karsu	150 Kartu	68,880,500	300 Kartu	100,000,000	300 Kartu	105,000,000	300 Kartu	110,250,000	300 Kartu	115,762,500	300 Kartu	121,550,625
Pemberian penghargaan bagi PNS/ Non PNS	Terlaksananya pemberian Penghargaan bagi PNS/ Non PNS	150 orang	101,100,000	350 orang	166,855,000	370 orang	162,012,750	400 orang	188,735,000	370 orang	184,190,000	330 orang	167,682,500
Pembuatan kartu tanda pengenal (nametag)	Terseidnya Kartu Tanda Pengenal (Nametag)	400 Nametag	16,806,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Karpeg/KPE	Tersedianya Karpeg/KPE	150 Kartu	55,468,000	300 Kartu	112,880,500	300 Kartu	118,524,525	300 Kartu	124,450,751	300 Kartu	130,673,289	300 Kartu	137,206,953
Proses penilaian kerja PNS	Terlaksananya Proses Penilaian Kinerja PNS	200 ASN	80,882,650	600 ASN	88,970,000	800 ASN	93,418,500	1000 ASN	98,089,425	1200 ASN	102,993,896	1400 ASN	108,143,591
Pembiayaan duka bagi ASN yang meninggal dunia	Terlaksananya Pemberian Duka Bagi ASN yang Meninggal	-	-	15 ASN	115,000,000	20 ASN	120,750,000	20 ASN	126,787,500	20 ASN	133,126,875	20 ASN	139,783,219
Perencanaan SDM aparatur sipil negara (ASN)	Tersedianya Kebutuhan SDM Aparatur	400 ASN	26,127,500	450 ASN	100,000,000	425 ASN	150,000,000	450 ASN	200,000,000	500 ASN	250,000,000	550 ASN	300,000,000

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Forum koordinasi BKD	Terlaksananya Forum Koordinasi BKD	2 kali	191,400,000	2 kali	220,000,000	2 kali	231,000,000	2 kali	242,550,000	2 kali	254,677,500	2 kali	267,411,375
Penyusunan buku publikasi kepegawaian	Tersedianya Buku Publikasi Kepegawaian	50 buku	314,144,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Survei kepuasan pelayanan publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Pelayanan Publik	500 org	21,000,000	-	-	-	-	-	-	1 kali	50,000,000	-	-
Pembinaan mental spiritual dan olahraga ASN	Terlaksananya pembinaan mental spiritual dan olahraga	-	-	24 kali	50,000,000	24 kali	65,000,000	24 kali	70,000,000	24 kali	75,000,000	24 kali	80,000,000
Pengusulan NIP CPNS dan PPPK	Terlaksananya Pengusulan NIP CPNS dan PPPK	-	-	391 ASN	100,000,000	425 ASN	150,000,000	450 ASN	200,000,000	500 ASN	250,000,000	550 ASN	300,000,000
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	-	-	4 Produk Hukum	90,000,000	4 Produk Hukum	94,500,000	4 Produk Hukum	99,225,000	4 Produk Hukum	104,186,250	4 Produk Hukum	109,395,563
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Simpeg Online yang Terintegrasi	-	1,090,104,000	11 Kab/ Kota	1,383,400,500	11 Kab/ Kota	1,800,000,000	11 Kab/ Kota	1,900,000,000	11 Kab/ Kota	2,000,000,000	11 Kab/ Kota	2,100,000,000
Pengembangan e-Governance (SIMPEG)	Tersedianya Pengembangan e-Governance (SIMPEG)	10.400 PNS	571,540,250	3 Aplikasi	808,533,500	3 Aplikasi	900,000,000	3 Aplikasi	850,000,000	3 Aplikasi	850,000,000	3 Aplikasi	850,000,000
Penataan arsip PNS lingkup Provinsi Maluku	Tersedianya Arsip Fisik ASN	4.954 PNS	227,500,000	10.100 PNS	178,717,000	10.100 PNS	300,000,000	10.100 PNS	350,000,000	10.100 PNS	400,000,000	10.100 PNS	400,000,000

Kegiatan	Output	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	
		Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
Penerapan sistem aplikasi kepegawaian (SAPK) online	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian secara Online dengan BKN melalui SAPK	10.500 PNS	236,635,000	10.500 PNS	230,000,000	10.400 PNS	300,000,000	10.300 PNS	350,000,000	10.200 PNS	350,000,000	10.100 PNS	350,000,000
Pembuatan, pengelolaan, dan pengembangan Website Provinsi Maluku	Meningkatnya Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	50 Info Publik	29,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan dan Pemanfaatan pusat publikasi informasi kepegawaian berbasis elektronik	Tersedianya publikasi informasi kepegawaian berbasis elektronik	-	-	150 info kepegawaian	100,000,000	200 info kepegawaian	150,000,000	200 info kepegawaian	200,000,000	200 info kepegawaian	250,000,000	300 info kepegawaian	300,000,000
Pemanfaatan fasilitas CAT (TKD)	Pemanfaatan fasilitas CAT untuk penambahan PAD	400 org	24,498,750	600 org	66,150,000	300 org	150,000,000	600 org	150,000,000	300 org	150,000,000	400 org	200,000,000
TOTAL			7,149,272,300		11,103,406,850		11,540,861,898		10,226,476,607		4,642,406,186		11,481,971,996

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku,



Drs. JASMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741226 199412 1 003